

ABSTRAK

Kawasan Karst merupakan salah satu sumber daya alam tambang yang memiliki karakteristik khusus dan fungsi hidrologi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan karst menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena keunikannya sering dimanfaatkan untuk kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian daerah. Kawasan Karst di Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 3 zona kelas yang ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi serta tidak boleh dieksploitasi. Namun, pada kenyatannya telah terjadi kegiatan pertambangan tanpa izin di kawasan karst Kabupaten Sumenep yang menimbulkan dampak seperti kekeringan, tanah longsor, dan kematian. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan. Dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan melalui buku, literatur, jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep serta kurangnya kerjasama antara penegak hukum dan pemerintah terkait dalam menerapkan undang undang maupun melakukan penegakan hukum. Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini merupakan Kepolisian masih tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan pertambangan tanpa izin akan masif terjadi.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pertambangan Tanpa Izin, Kawasan Karst Kabupaten Sumenep

ABSTRACT

The Karst region is one of the natural mining resources with unique characteristics and important hydrological functions for life. Its presence has drawn attention from both the central and local governments due to its uniqueness often being exploited for mining activities, which support the local economy. In Sumenep Regency, the Karst area is divided into 3 class zones designated as geological protection areas where exploitation is prohibited. However, unauthorized mining activities have occurred in the Sumenep Karst region, resulting in impacts such as drought, landslides, and fatalities.

Therefore, this study aims to analyze law enforcement against unauthorized mining in the Sumenep Karst region. The research methodology employed is empirical legal research using a case approach and legislative approach. It includes observations, interviews, and literature reviews encompassing books, literature, journals, and relevant legislation concerning the researched issues. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis.

The findings indicate weak law enforcement against unauthorized mining in the Sumenep Karst region and a lack of cooperation between law enforcement agencies and relevant governments in applying and enforcing the law. So far, the law enforcement efforts by the police have not deterred offenders and have contributed to the widespread occurrence of unauthorized mining activities.

Keywords: *Law Enforcement, Unauthorized Mining, Karst Areas of Sumenep Regency*